



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, pelaksanaan program utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RANHAM Provinsi adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
8. Panitia RANHAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia RANHAM Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal SKPD maupun kelompok kerja antar SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di daerah.

Pasal 2

RANHAM Provinsi bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala SKPD, wajib melaksanakan program RANHAM Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. pendidikan HAM;
 - d. penerapan norma dan standar HAM;
 - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan program RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Panitia RANHAM Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) SKPD dan Instansi vertikal yang berada di Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Panitia RANHAM Provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan diatur oleh Keputusan Ketua Panitia RANHAM Provinsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan diatur oleh Keputusan Ketua Panitia RANHAM Provinsi.

Pasal 5

- (1) Panitia RANHAM Provinsi wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan Panitia RANHAM Provinsi dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan RANHAM Provinsi di masing-masing SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan RANHAM Provinsi di masing-masing Instansi vertikal yang berada di Daerah dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2011 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2011
TANGGAL 29 NOVEMBER 2011

KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014

A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI RANHAM

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PEMBENTUKAN PANITIA RANHAM										
1.	Belum terbentuknya Panitia RANHAM Prov DIY periode 2011-2014	Pembentukan Panitia RANHAM Prov DIY periode 2011-2014	Membentuk dan mengukuhkan Panitia RANHAM Prov DIY periode 2011-2014	Keputusan Gubernur tentang RANHAM Prov DIY periode 2011-2014	Terbentuknya Panitia RANHAM Prov DIY periode 2011-2014	v	-	-	-	Biro Hukum Setda Prov DIY dan Kanwil KemenkumHAM DIY
2.	Belum optimalnya pelaksanaan RANHAM Prov DIY periode 2004-2009	Peningkatan koordinasi Panitia RANHAM Prov DIY	1 Melaksanakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Prov DIY paling sedikit 6 (enam) bulan sekali 2 Membentuk Pokja di setiap (SKPD) di Prov DIY	1 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Prov DIY 2 Penetapan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tata laksana Pokja	Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal	v	v	v	v	Panitia RANHAM Prov DIY
PENGUATAN PANITIA RANHAM										
1.	Masih lemahnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM Prov DIY	Peningkatan pemahaman Program RANHAM	1 Sosialisasi/Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM Prov DIY	1 Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi Program RANHAM bagi Panitia RANHAM Prov DIY.	Meningkatnya pemahaman Program RANHAM oleh Panitia RANHAM Prov DIY	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY dan Kanwil KemenkumHAM DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
			2 Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov DIY	2 Terselenggaranya Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov DIY						

B. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Masih adanya Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM	Harmonisasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyiapkan parameter HAM untuk harmonisasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah 2 Membentuk Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan 3 Melaksanakan sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah 4 Melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersusunnya parameter HAM untuk harmonisasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 2 Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif 3 Terlaksananya sosialisasi pedoman harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah 4 Rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terlaksananya harmonisasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berperspektif HAM 2 Rekomendasi adanya Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM 	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY dan Kanwil KemenkumHAM DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 Melaksanakan evaluasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM	5 Tersusunnya informasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif HAM						
2.	Masih adanya Peraturan Daerah yang tumpang tindih	Penyelarasan Peraturan Daerah	<p>1 Menginventarisasi Peraturan Daerah yang tumpang tindih</p> <p>2 Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Peraturan Daerah yang tumpang tindih</p> <p>3 Menyusun dan menelaraskan Peraturan Daerah</p> <p>4 Meningkatkan koordinasi Panitia RANHAM Prov DIY dengan Law Centre Kanwil Kemenkumham DIY</p>	<p>1 Terinventarisasi Peraturan Daerah yang tumpang tindih</p> <p>2 Tersusunnya hasil kajian dan penelitian terhadap Peraturan Daerah yang tumpang tindih</p> <p>3 Tersusunnya Peraturan Daerah yang serasi dan selaras</p> <p>4 Meningkatnya koordinasi Panitia RANHAM Prov DIY dengan Law Centre Kanwil Kemenkumham DIY</p>	Peraturan Daerah yang serasi dan selaras	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY dan Kanwil KemenkumHAM DIY

C. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat tentang HAM	Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat	<p>1 Menyusun modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p> <p>2 Melaksanakan diseminasi dan pelatihan HAM berkelanjutan bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p> <p>3 Melaksanakan pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p>	<p>1 Tersusunnya modul dan bahan untuk diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p> <p>2 Terlaksananya diseminasi dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p> <p>3 Terlaksananya pelatihan untuk pelatih dan fasilitator/penyuluh pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat</p>	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM bagi aparatur pemerintah Prov DIY dan masyarakat	-	v	v	v	Badiklat Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Disdikpora Prov DIY Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY Prov DIY dan BPPM Prov DIY, Dishubkominfo Prov DIY
2.	Masih terbatasnya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan Prov DIY	Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar serta penganekaragaman penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan Prov DIY	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan Prov DIY	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar HAM dalam lingkungan pendidikan Prov DIY	Terpenuhinya bahan ajar dan penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan Prov DIY	-	v	v	v	Badiklat Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Didikpora, Dinas Sosial Prov DIY dan BPPM, Dishubkominfo Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 Menganekaragamkan metodologi HAM dilingkungan pendidikan Prov DIY	2 Meningkatnya penganekaragaman penggunaan metodologi HAM dilingkungan pendidikan Prov. DIY						
3.	Belum semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional memuat materi HAM	Penguatan materi HAM pada kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional	1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2 Melaksanakan pendidikan HAM bagi Widyaiswara	1 Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional 2 Terlaksananya pendidikan HAM bagi Widyaiswara	Semua kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis dan fungsional memuat materi HAM	-	v	v	v	Badiklat Prov DIY, dan Kanwil KemenkumHAM DIY
4.	Belum optimalnya peran media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	Peningkatan peran lembaga/instansi media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	Melakukan pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi media cetak, elektronik dan seni tradisional	Terlaksananya pembudayaan HAM melalui peran lembaga/instansi media cetak, elektronik dan seni tradisional	Meningkatnya peran lembaga/instansi media massa, seni dan budaya dalam pembudayaan nilai-nilai HAM	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Dishubkominfo Prov DIY, Dinas Kebudayaan Prov DIY dan Dinas Pariwisata Prov DIY

D. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. HAK UNTUK HIDUP										
1.	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan	Peningkatan taraf hidup ibu hamil	<p>1 Meningkatkan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin</p> <p>2 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit oleh tenaga tenaga yang profesional dan didukung sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>3 Meningkatkan target program vaksinasi tanpa dipungut biaya bagi bayi dan keluarga miskin</p> <p>4 Memberikan bantuan gizi bagi bayi keluarga miskin</p>	<p>1 Meningkatnya pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil dari keluarga miskin</p> <p>2 Meningkatnya pelayanan kesehatan, kepada ibu hamil pada saat dan setelah melahirkan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Rumah Sakit</p> <p>3 Meningkatnya target program vaksinasi gratis bagi bayi dari keluarga miskin</p> <p>4 Terlaksananya bantuan gizi bagi bayi keluarga miskin</p>	Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran	-	v	v	v	Dinas Kesehatan Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY Prov DIY dan BPPM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>5 Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>6 Sosialisasi tentang penanganan perinatal</p> <p>7 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang berkualitas (sesuai dengan SOP)</p>	<p>5 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>6 Meningkatnya pengetahuan tentang penanganan perinatal</p> <p>7 Meningkatnya kesertaan KB bagi keluarga miskin</p>						
2.	Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan	Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan	<p>1 Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan</p> <p>2 Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana & tahanan</p>	<p>1 Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan</p> <p>2 Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV / AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan</p>	Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria	-	v	v	v	Kanwil KemenkumHAM DIY, Dinas Kesehatan Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY Prov DIY dan Rumah Sakit Grhasia

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Menurunnya kualitas lingkungan yang mengancam perikehidupan dan makhluk hidup	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>1 Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan</p> <p>2 Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal</p> <p>3 Menyusun panduan pengelolaan lingkungan(baku mutu, lingkungan hidup amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4 Melanjutkan pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan</p> <p>5 Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat</p>	<p>1 Terlaksananya bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan</p> <p>2 Terlaksananya pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal</p> <p>3 Tersusunnya panduan pengelolaan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4 Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan kepada Pemerintah Kab/Kota dan pemerhati lingkungan</p> <p>5 Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat</p>	Semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup	-	v	v	v	BLH Prov DIY, Dinas Pertanian Prov DIY, Dishutbun Prov DIY, Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY, Disperindagkop-UKM Prov DIY, Disdikpora Prov DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam	<p>1 Menginventarisasi dan mengkaji Peraturan Daerah di bidang lingkungan dan sumber alam yang tumpang tindih</p> <p>2 Melaksanakan pengawasan dan meningkatkan peran posko pengaduan LH & sumber daya alam</p> <p>3 Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>4 Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam</p>	<p>1 Terinventarisasinya dan tersusunnya hasil kajian Peraturan Daerah di bidang lingkungan dan sumber alam yang tumpang tindih</p> <p>2 Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>3 Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>4 Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam</p>	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat	-	v	v	v	BLH Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Polda DIY dan SatPol PP
5	Masih belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	Peningkatan fasilitas umum yang menunjang terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat	Membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Tersedianya fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum	Terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	-	v	v	v	BLH Prov DIY, Dinas Kesehatan Prov DIY, Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan Dinas Sosial Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN										
1.	Masih adanya kendala untuk melangsungkan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin	Kemudahan melangsungkan perkawinan yang sah, memperoleh surat nikah dan akta kelahiran bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis	<p>1 Melakukan pendataan gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p> <p>2 Memberikan KTP gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p> <p>3 Melaksanakan perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis</p> <p>4 Pemberian surat/akta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin</p>	<p>1 Adanya data gelandangan, pengemis, dan orang miskin yang tidak mempunyai KTP</p> <p>2 Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh KTP gratis</p> <p>3 Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis</p> <p>4 Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis</p>	Terpenuhinya hak bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin memperoleh surat/akta nikah dan akta kelahiran	-	v	v	v	Dinas Sosial Prov DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda Prov DIY dan Kanwil Kementerian Agama DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin	5 Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis						
2	Masih banyaknya perkawinan yang belum dicatatkan pada kantor pencatatan yang mengakibatkan isteri dan anaknya tidak mendapatkan perlindungan hukum	1 Peningkatan pemahaman tentang syarat perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan 2 Peningkatan perlindungan hukum bagi isteri dan anak	1 Sosialisasi tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2 Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang perkawinannya belum dicatatkan	1 Meningkatnya pemahaman tentang perkawinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2 Terlaksananya pencatatan setiap perkawinan	Terpenuhinya pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Dinas Sosial Prov DIY dan BPPM Prov DIY, Kanwil Kementerian Agama DIY
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI										
1.	Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar	Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar	1 Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yg belum memperoleh pendidikan dasar 2 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1 Tersedianya data warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Terpenuhinya pendidikan dasar bagi warga masyarakat termasuk anak usia sekolah tanpa dipungut biaya	-	v	v	v	Disdikpora Prov DIY dan Dinas Sosial Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 Mendorong Pemerintah Prov untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya	3 Tersusun dan terlaksananya kebijakan Pemerintah Prov tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya						
2	Masih banyaknya warga masyarakat tidak mendapatkan akses pendidikan terutama karena faktor geografis (pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau terluar) dan/atau mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	Membuka akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi warrga masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama karena faktor geografis, mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	1 Membangun prasarana dan menyediakan sarana transportasi di wilayah-wilayah yang tersulit terjangkau 2 Membangun jaringan informasi dan komunikasi menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3 Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	1 Terbukanya akses pendidikan bagi warga masyarakat terutama karena faktor geografis, mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil 2 Terbukanya akses jaringan informasi dan komunikasi menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 3 Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	Terpenuhinya hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan terutama karena faktor geografis, mengalami bencana alam/sosial, dan komunitas adat terpencil	-	v	v	v	Disdikpora Prov DIY, Dishubkominfo Prov DIY, Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan BPBD Prov DIY
3.	Masih banyaknya warga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan	Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1 Sosialisasi pentingnya pendidikan 2 Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1 Terlaksananya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan 2 Berfungsinya secara optimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	-	v	v	v	Disdikpora Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY dan BPPM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN										
1.	Terbatasnya Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	<p>1 Penyusunan produk hukum daerah tentang Bantuan Hukum</p> <p>2 Pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin</p>	<p>1 Mempercepat rancangan produk hukum daerah tentang Bantuan Hukum</p> <p>2 Meningkatkan pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin</p>	<p>1 Tersedianya produk hukum daerah tentang Bantuan Hukum</p> <p>2 Meningkatnya pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin</p>	Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Polda DIY Kejati DIY dan Pengadilan Tinggi DIY
2.	Masih adanya penerapan hukum pidana yang kurang mencerminkan keadilan	Pelaksanaan hukum pidana sesuai dengan keadilan	<p>1 Mendorong pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>) dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius</p> <p>2 Menerapkan hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan</p>	<p>1 Terlaksananya <i>Restorative justice</i> sistem peradilan pidana</p> <p>2 Terlaksananya hukum pidana (<i>criminal justice system</i>) yang mencerminkan keadilan</p>	Penerapan hukum pidana yang mencerminkan keadilan	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Polda DIY Kejati DIY dan Pengadilan Tinggi DIY
3.	Masih adanya aparat penegak hukum yang kurang memahami HAM	Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum	1 Penyusunan buku saku HAM bagi aparat penegak hukum	1 Tersusunnya buku saku HAM bagi aparat penegak hukum	Semua aparat penegak hukum memahami HAM	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Polda DIY Kejati DIY & Pengadilan Tinggi DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum	2 Terlaksananya sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum						
4	Masih adanya penanganan perkara pidana yang belum mencerminkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan	Penanganan perkara pidana lebih cepat, sederhana dan biaya ringan	<p>1 Menyusun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu</p> <p>2 Mensosialisasikan SOP penanganan perkara pidana secara terpadu</p> <p>3 Melaksanakan penanganan perkara pidana secara terpadu</p> <p>4 Meningkatkan koordinasi Dilkumjarkpol di tingkat daerah</p>	<p>1 Tersedianya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu</p> <p>2 Terlaksananya SOP penanganan perkara pidana secara terpadu</p> <p>3 Terlaksananya penanganan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan</p> <p>4 Meningkatnya koordinasi Dilkumjarkpol di tingkat daerah</p>	Terwujudnya penanganan perkara pidana yang menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpadu	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Polda DIY Kejati DIY dan Pengadilan Tinggi DIY
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI										
	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	1 Melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	1 Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya pemahaman tentang kebebasan beragama, beribadat, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama, dan toleransi antar umat beragama/ kepercayaan lain	-	v	v	v	Kanwil Kementerian Agama DIY dan Badan Kesbanglinmas Prov DIY, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2 Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik</p> <p>3 Meningkatkan Peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>2 Terlaksananya pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik</p> <p>3 Meningkatnya peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB dan instansi terkait serta <i>focus group discussion (FGD)</i></p>	<p>2 Berkurangnya konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama/ kepercayaan</p>					
6. HAK ATAS RASA AMAN										
1.	Masih adanya tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	Penghapusan tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum	<p>1 Sosialisasi UU 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia</p> <p>2 Mendorong penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>	<p>1 Terlaksananya sosialisasi UU 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia</p> <p>2 Menurunnya tingkat kekerasan dalam proses penegakan hukum</p>	Berkurangnya tindak penyiksaan yang dialami masyarakat	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Kanwil Agama, Polda DIY Kejati DIY dan Pengadilan Tinggi DIY, SatPol PP

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 Meningkatkan pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum	3 Meningkatnya pengawasan dalam rangka penghapusan kekerasan dalam proses penegakan hukum						
2.	Masih terjadinya demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman	Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	<p>1 Meningkatkan pendidikan/sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat</p> <p>2 Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)</p> <p>3 Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa</p> <p>4 Mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat</p>	<p>1 Terlaksananya pendidikan/sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat</p> <p>2 Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)</p> <p>3 Terciptanya/ terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa</p> <p>4 Meningkatnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat</p>	Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemenkumHAM DIY, Kanwil Agama, Badan Kesbanglinmas Prov DIY, Disdikpora Prov DIY, Dishubkominfo Prov DIY, Polda DIY dan Kejati DIY
3.	Tingginya kasus sengketa tanah termasuk dikawasan hutan yang mengakibatkan konflik	Pembenahan sistem administrasi pertanahan termasuk dikawasan hutan	1 Legalisasi aset tanah termasuk dikawasan hutan secara menyeluruh dan akurat	1 Meningkatnya tertib administrasi pertanahan termasuk dikawasan hutan	Berkurangnya kasus sengketa tanah termasuk dikawasan hutan	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil BPN DIY, Dishutbun Prov DIY, Biro Tapem Setda Prov DIY, DPPKA, Polda DIY & Kejati DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2 Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi aset tanah termasuk dikawasan hutan</p> <p>3 Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan</p>	<p>2 Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi aset tanah termasuk dikawasan hutan</p> <p>3 Meningkatnya pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan</p>						
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN										
1.	Masih belum terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Peningkatan pemenuhan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	Membangun sarana dan prasarana air bersih	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih	Terpenuhinya hak atas air bersih khususnya bagi masyarakat miskin	-	v	v	v	Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan Dinas Sosial Prov DIY
2.	Masih terbatasnya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin	Memberikan kemudahan (kredit mudah, murah dan tanpa agunan) bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat	Tersedianya akses masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat	Tersedianya akses perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin	-	v	v	v	Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan Dinas Sosial Prov DIY
3.	Masih rendahnya akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Peningkatan akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya	Meningkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal	Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memperoleh konsesi pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hutan desa dan hutan tanaman rakyat	-	v	v	v	Dishutbun Prov DIY dan BLH Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Masih rendahnya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	Peningkatan akses nelayan dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membangun fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya 2 Meningkatkan langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya 2 Meningkatnya langkah preventif dan represif terhadap penangkapan ikan secara illegal 3 Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat 	Terpenuhinya akses nelayan dan masyarakat lainnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan	-	v	v	v	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov DIY, Dinas Perindagkop-UKM Prov DIY
5.	Belum maksimalnya rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan pendataan atas jumlah dan jenis penyandang cacat 2 Meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat 3 Meningkatkan bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya data jumlah dan jenis penyandang cacat 2 Meningkatnya kesempatan kerja dan keterampilan kerja serta pemberdayaan penyandang cacat 3 Meningkatnya bantuan jaminan sosial kebutuhan dasar bagi penyandang cacat 	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	-	v	v	v	Dinas Sosial Prov DIY, Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan Disnakertrans Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4 Meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik</p> <p>5 Sosialisasi tentang kepedulian terhadap penyandang cacat (disabilitas)</p>	<p>4 Meningkatnya aksesibilitas penyandang cacat pada sarana dan prasarana publik</p> <p>5 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat (disabilitas)</p>						
6.	Masih tingginya angka pengangguran	Penempatan, perluasan, dan pemanfaatan peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri	<p>1 Mewujudkan lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri</p> <p>2 Menyempumakan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah</p> <p>3 Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja</p> <p>4 Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun infomal</p>	<p>1 Terwujudnya lapangan kerja dan usaha-usaha mandiri</p> <p>2 Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah</p> <p>3 Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil</p> <p>4 Tersedianya lapangan kerja di daerah</p>	Menurunnya angka pengangguran	-	v	v	v	Disnakertrans Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, dan BNP2TKI DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Belum optimalnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	<p>1 Meningkatkan fasilitasi dan perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya</p> <p>2 Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI</p> <p>3 Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI</p> <p>4 Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)</p> <p>5 Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima</p> <p>6 Meningkatkan layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum</p>	<p>1 Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya</p> <p>2 Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI</p> <p>3 Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI</p> <p>4 Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)</p> <p>5 Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima</p> <p>6 Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum</p>	Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia	-	v	v	v	Disnakertrans Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, dan BNP2TKI DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>7 Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban TKI</p> <p>8 Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>	<p>7 Meningkatnya pemahaman masyarakat/ calon TKI tentang prosedur bekerja keluar negeri maupun pemahaman tentang hak dan kewajibannya</p> <p>8 Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI</p>						
8.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	<p>1 Melakukan pendataan masyarakat miskin</p> <p>2 Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas</p>	<p>1 Tersedianya data masyarakat miskin</p> <p>2 Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas</p>	Terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin	-	v	v	v	Dinas Kesehatan Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY, BKKBN DIY dan BPS DIY
9.	Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin	<p>1 Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p> <p>2 Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p>	<p>1 Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p> <p>2 Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin</p>	Terpenuhinya hak atas pangan yang meliputi kecukupan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin	-	v	v	v	Bappeda Prov DIY, Dinas Pertanian Prov DIY, Dinas Kesehatan Prov DIY dan Dinas Perindagkop-UKM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3 Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan</p> <p>4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</p>	<p>3 Tersusunnya sistem distribusi dan harga pangan</p> <p>4 Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri</p>						
10.	Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat	Pengendalian pertambahan penduduk	<p>1 Sosialisasi ten tang Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>2 Meningkatkan persediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat</p> <p>3 Advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja</p>	<p>1 Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>2 Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi</p> <p>3 Menurunnya perkawinan usia dini</p>	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	-	v	v	v	Dinas Kesehatan Prov DIY Dishubkominfo Prov DIY dan BKKBN DIY
11.	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh akses listrik	Peningkatan akses listrik bagi masyarakat	1 Melakukan pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik	1 Tersusunnya pemetaan daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup	Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat	-	v	v	v	Dinas PU-P dan ESDM Prov DIY dan BKPM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2 Meningkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik</p> <p>3 Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin</p>	<p>2 Terpasangnya jaringan listrik dan meningkatnya daya listrik</p> <p>3 Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin</p>						
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN										
	Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	Penyempurnaan sistem data kependudukan yang akurat dan terkini	<p>1 Melaksanakan tertib adminduk</p> <p>2 Memberikan KTP gratis kepada penduduk</p>	<p>1 Terlaksananya tertin adminduk</p> <p>2 Penduduk memperoleh KTP gratis</p>	Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum	-	v	v	v	Biro Tata Pemerintahan Setda Prov DIY dan BPS DIY
9. HAK PEREMPUAN										
1.	Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender	<p>1 Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender</p> <p>2 Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih responsif gender</p>	<p>1 Penyusunan Perda Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)</p> <p>2 Melakukan sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan penyelenggara negara</p>	<p>1 Tersusunnya Perda Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)</p> <p>2 Meningkatnya pemahaman bagi masyarakat dan penyelenggara negara tentang keadilan dan kesetaraan gender</p>	Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender	-	v	v	v	BPPM Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY dan Kanwil KemkumHAM DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>3 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>4 Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender bagi aparat penegak hkum</p> <p>5 Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender</p>	<p>3 Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender baik ditingkat pusat dan daerah</p> <p>4 Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>5 Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundangundangan yang masih bias gender</p>						
2.	Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	<p>1 Meningkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan</p> <p>2 Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik</p> <p>3 Optimalisasi kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan dalam jabatan publik</p>	<p>1 Meningkatnya kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan</p> <p>2 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam jabatan publik</p> <p>3 Terpenuhinya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik</p>	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik	-	v	v	v	BKD Prov DIY, Badiklat Prov DIY dan BPPM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	Peningkatan akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	<p>1 Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB</p> <p>2 Sosialisasi tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB</p>	<p>1 Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB</p> <p>2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB</p>	Terpenuhinya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB	-	v	v	v	BPPM Prov DIY dan BKKBN DIY
4.	Masih banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	Peningkatan upaya pencegahan KDRT dan pelayanan serta perlindungan korban terutama terhadap perempuan dan anak	<p>1 Sosialisasi tentang penghapusan KDRT kepada aparaturnya dan masyarakat</p> <p>2 Peningkatan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>1 Meningkatnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang penghapusan KDRT</p> <p>2 Meningkatnya pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga</p>	Berkurangnya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak	-	v	v	v	BPPM Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, Polda DIY dan Kejati DIY
5.	Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak	Peningkatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1 Sosialisasi Peraturan PerUUan yang terkait dengan TPPO	1 Terlaksananya sosialisasi Peraturan PerUUan yang terkait dengan TPPO	Berkurangnya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak					BPPM Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, Polda DIY dan Kejati DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3 Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p> <p>4 Melaksanakan aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak</p> <p>5 Meningkatkan penindakan terhadap pelaku TPPO</p> <p>6 Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO</p>	<p>2 Tersusunnya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai program, kegiatan, serta teralokasinya anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang</p> <p>3 Terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah</p> <p>4 Terlaksananya aksi nasional pencegahan eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak</p> <p>5 Meningkatnya penindakan terhadap pelaku TPPO</p> <p>6 Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu untuk perlindungan saksi dan/atau korban TPPO</p>						

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. HAK ANAK										
1.	Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak ABH	<p>1 Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektik HAM anak untuk menangani ABH</p> <p>2 Partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restoratif justice</i> yang berbasis masyarakat</p>	<p>1 Meningkatnya pemahaman, kepekaan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan ABH</p> <p>2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan <i>restoratif justice</i> yang berbasis masyarakat</p>	<p>1 Terlindunginya ABH dalam proses peradilan</p> <p>2 Penanganan ABH dengan pendekatan <i>restoratif justice</i></p>	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, BPPM Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY, Polda DIY dan Kejati DIY
2.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat	<p>1 Melakukan pendataan terhadap anak miskin dan anak cacat</p> <p>2 Program pelayanan kesehatan dasar bagi anak miskin dan anak cacat (Jamkesmas)</p> <p>3 Peningkatan kualitas gizi anak miskin dan anak cacat</p>	<p>1 Tersediannya data anak miskin dan anak cacat</p> <p>2 Meningkatnya jumlah anak miskin dan anak cacat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar (Jamkesmas)</p> <p>3 Meningkatnya kualitas gizi anak miskin dan anak cacat</p>	Anak miskin dan anak cacat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal	-	v	v	v	Dinas Kesehatan Prov DIY dan Dinas Sosial Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	Peningkatan penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	<p>1 Melakukan pendataan terhadap jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p> <p>2 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p> <p>3 Melakukan peningkatan keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p>	<p>1 Tersediannya data jumlah dan kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p> <p>2 Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p> <p>3 Meningkatnya keterampilan bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan</p>	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan	-	v	v	v	Dinas Kesehatan Prov DIY, Dinas Sosial Prov DIY, dan BPPM Prov DIY
4	Belum memadainya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	Peningkatan koordinasi K/L dalam penanganan NAPZA	<p>1 Melakukan pendataan anak korban NAPZA</p> <p>2 Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA</p> <p>3 Penyusunan program rehabilitasi anak korban NAPZA</p>	<p>1 Tersediannya data anak korban NAPZA</p> <p>2 Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya NAPZA</p> <p>3 Tersedianya program rehabilitasi dalam penanganan anak korban NAPZA</p>	Anak korban NAPZA mendapatkan penanganan secara terpadu	-	v	v	v	Dinas Sosial Prov DIY, Dinas Kesehatan Prov DIY, Disdikpora Prov DIY dan BPPM Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Perlindungan anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai	Penanganan perlindungan anak situasi darurat yang memadai	<p>1 Penyusunan kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak dalam situasi darurat</p> <p>2 Sosialisasi PerUUan PA dan kebijakan yg berkaitan dengan penanganan PA situasi darurat</p> <p>3 Melakukan pendataan anak situasi darurat</p> <p>4 Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat</p> <p>5 Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat</p> <p>6 Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat</p>	<p>1 Terususunnya kebijakan teknis secara terpadu penanganan anak situasi darurat</p> <p>2 terlaksananya sosialisasi PerUUan PA dan kebijakan yg berkaitan dengan penanganan perlindungan anak situasi darurat</p> <p>3 Tersedianya data anak situasi darurat</p> <p>4 Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat</p> <p>5 Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat</p> <p>6 Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat</p>	Terpenuhinya hak anak dalam situasi darurat secara terpadu	-	v	v	v	Dinas Sosial Prov DIY, Dinas Kesehatan Prov DIY, Disdikpora Prov DIY, BPPM Prov DIY dan BPBD Prov DIY

E. PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM	<p>1 Menyusun <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM</p> <p>2 Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadakan</p> <p>3 Mengkoordinasi penanganan Komunikasi Masyarakat</p> <p>4 Melakukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p> <p>5 Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p>	<p>1 Tersusunnya <i>Standard Operating Prosedur (SOP)</i> untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM</p> <p>2 Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang belum/ tidak diadakan</p> <p>3 Terlaksananya koordinasi penanganan Komunikasi Masyarakat</p> <p>4 Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p> <p>5 Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat</p>	Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat	-	v	v	v	Dishubkominfo Prov DIY, Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY, ORI Perwakilan Yogyakarta-Jateng, LOD dan LOS

F. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM	<p>1 Persiapan penyusunan pedoman:</p> <p>a Penyusunan indikator implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>b Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>2 Menyusun pedoman pengumpulan data evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>3 Melaksanakan sosialisasi pedoman pengumpulan data evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p>	<p>1 Terbentuknya:</p> <p>a Indikator implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>b Konsep dan definisi data dan implementasi RANHAM dan HAM</p> <p>2 Tersedianya pedoman pengumpulan data evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>3 Dipahaminya pedoman pengumpulan data evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p>	Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini serta mudah diakses	-	v	v	v	Biro Hukum Setda Prov DIY, Kanwil KemkumHAM DIY dan Dishubkominfo Prov DIY

No	PERMASALAHAN	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU				Penanggung Jawab (Instansi/ Lembaga)
						T1	T4	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>4 Melakukan pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p> <p>5 Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM</p> <p>6 Menyiapkan informasi HAM berbasis peta Indonesia</p> <p>7 Melakukan evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>8 Menyampaikan laporan implementasi RANHAM kepada Panitia RANHAM</p>	<p>4 Tersedianya data hasil pengumpulan data administratif (data sekunder) dan/atau pengumpulan data melalui kegiatan survei</p> <p>5 Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) HAM</p> <p>6 Tersedianya informasi HAM berbasis peta Indonesia</p> <p>7 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang komprehensif tentang implementasi RANHAM</p> <p>8 Tersedianya laporan implementasi RANHAM</p>						

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X